

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan pilihan model sistem politik untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab, pada hakikatnya di dalam system politik demokrasi rakyatlah yang berdaulat, karena di dalam demokrasi terdapat peluang-peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Karena di dalam demokrasi keanekaragaman dan perbedaan dapat di terima. *World Movement for Democracy 2010* mengatakan bahwa demokrasi di suatu Negara tumbuh dan berkembang dengan baik jika prosesnya di lakukan dengan menghindari politik uang. Karena praktek demokrasi yang seperti itu akan menghancurkan demokrasi itu sendiri dan pada akhirnya akan meminggirkan aspirasi masyarakat.

Indonesia merupakan Negara yang menganut system demokrasi. System demokrasi itu sendiri berasal dari Negara Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat di artikan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks penyelenggaraan demokratisasi di tingkat lokal, mulai dari tahun 2005 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih langsung oleh

masyarakat sesuai dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka setiap daerah harus mampu mengatur dan menjalankan daerahnya sendiri dengan kewenangan yang di miliknya UU No. 32 tahun 2004 juga menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan system pemilihan langsung dengan kata lain rakyat memilih secara langsung orang yang di anggap mampu dan pantas untuk di pilih menjadi kepala daerah. Hal ini di jelaskan pada pasal 56 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “ kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih dalam satu pasangancalon yang di laksanakan secara demokratis berdasarkan azaz langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” (UU No. 32 tahun 2004).

Selain UU No. 32 tahun 2004 Peraturan Pemerintah RI No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah menyebutkan bahwa “sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi dan UUD 1945 serta UU No. 32 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah di pilih secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil melalui pemungutan suara” juga menguatkan pelaksanaan demokratisasi tingkat lokal di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakui adanya otonomi yang di miliki oleh desa dan kepala desa dapat di berikan penguasaan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah daerah untuk melaksanakan Pemerintah tertentu. Pemerintah Desa merupakan

simbol formal dari kesatuan masyarakat desa, Pemerintahan Desa di selenggarakan di bawah pimpinan Kepala Desa untuk mewakili masyarakat desa yang berguna membina kehidupan masyarakat desa, perekonomian desa, memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. Kewenangan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun ada tataran implementasinya terjadi antara Negara yang satu dengan Negara yang lain. Di Indonesia demokrasi bukan merupakan suatu yang asing mengacu pada tradisi musyawarah-mufakat, tradisi ini mengandung nilai-nilai demokrasi. Praktik musyawarah-mufakat (asas kerakyatan) di sejumlah daerah di Indonesia telah berlangsung sejak berabad-abad sejak masyarakat hidup dalam sistem perkauman di zaman purba yang terus berlanjut di zaman kerajaan-kerajaan hingga saat ini, seperti kehidupan masyarakat Desa. Tradisi yang hidup dalam masyarakat agraris yang disebut dengan tradisi berembug itu bahkan sudah terlembagakan dalam bentuk seperti rembug desa, dan forum-forum musyawarah masyarakat desa.

Kehadiran pemilihan secara langsung yang bebas dan adil (free and fair) adalah suatu keniscayaan. Bahkan system politik apapun yang di tetapkan oleh suatu Negara sering kali menggunakan pemilu sebagai klaim

demokrasi atas system politik yang di bangunnya. Oleh karena itu, bisa di pahami jika banyak ilmuwan politik yang menggunakan pemilihan langsung sebagai tolak ukur pelaksanaan demokrasi suatu Negara. Seperti kata rannay “No free elections, no democracy” (Surbakti, 1997 : 9).

Fenomena pemilihan umum secara langsung tak sepenuhnya berjalan dengan baik. Elemen politik yang terjadi sejak rekrutmen calon oleh partai sampai pemungutan suara. Maraknya politik uang bisa terjadi karena rendahnya kesadaran dan moralitas politik masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sulit paradigm kepemimpinan daerah berubah menjadi semakin demokratis, peka terhadap persoalan rakyat, partisipatif dalam pengambilan kebijakan, transparan dalam anggaran dan akuntabel dalam tugas dan kewajiban (Prihatmoko, 2008 : 172).

Politik uang merupakan upaya mempengaruhi perilaku pemilih dengan menggunakan imbalan tertentu, dengan kata lain politik uang sebagai tindakan jual-beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Politik uang dapat terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan desa hingga pemilihan suatu Negara (Ismawan, 1999 : 5).

Praktik politik uang di Indonesia pada proses demokrasi pada tingkat yang paling rendah, yaitu pada pemilihan kepala desa (pemilukades). Para calon acapkali menjadi “sinterklas” menjelang hari H atau hari pemungutan

suara. Mereka membagi-bagikan sejumlah uang atau barang agar pilihan rakyat jatuh kepadanya. Tidak jarang seorang kepala desa harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk meraih kemenangan dalam pemilukades.

Ketika demokrasi terpasang dan mekanisme check and balance tidak berjalan, politik uang terjadi tanpa koreksi. Akibatnya, politik uang menjadi bersifat sistematis, bahkan berkesan sebagai fenomenal kultur. Orang yang terlibat dalam praktik ini di paksa pada keharusan memilih, terlibat atau tersingkir dari system. Mereka yang lebih memilih idealism sangat mungkin tersingkir dari system. Artinya mereka akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan mata pencaharian.

Praktik politik uang yang terjadi di Indonesia sasarannya adalah masyarakat yang kurang mampu dalam pelaksanaannya di lakukan berbagai cara antara lain menyampaikan hadiah berupa uang, barang atau sumbangan melalui pemuka masyarakat yang formal maupun non formal atau melalui panti asuhan, sekolah-sekolah maupun lembaga swadaya lainnya. Hal ini sudah sangat jelas bermuatan politik yang bertujuan memperoleh simpati dan mempengaruhi calon pemilih dalam pemilukada ataupun pemilihan lainnya (Sumartini, 2004 : 172)

Pada data yang di peroleh jumlah penduduk Desa Bajomulyo pada tahun 2017 sebanyak 5.804 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.843

orang dan perempuan sebanyak 2.961 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.538 KK. Mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Bajomulyo adalah sebagai sawasta yaitu seperti pedagang ikan, pedagang nasi dll. dalam masalah demokratisasi ini kondisi perbedaan yang menyolok pada desa yang di teliti ini adalah terletak pada tingkat dan pola hidup penduduknya. Sebagian besar penduduk terdiri dari pekerjaan yang di anggap kurang mampu dan sebagian penduduk yang menengah adalah yang berjualan ikan sedangkan penduduk yang tergolong ekonominya tinggi adalah dia yang mempunyai perusahaan ikan (Cold storage) memiliki kapal nelayan sendiri.

Menjelang pemilihan umum dalam hal ini adalah pemilukades, memasuki tahap yang paling rawan. Beberapa modus politik uang yang paling rawan terjadi meliputi :

1. Operasi fajar atau serangan fajar yang sering di lakukan oleh salah satu peserta pemilu di pedesaan. Pada hari H pemungutan suara, mereka mengetuk rumah-rumah penduduk di pagi buta sebelum calon pemilih berangkat ke tempat pemungutan suara (TPS), untuk memberikan uang alakadarnya dengan pesan-pesan tertentu, agar nanti memilih gambar tertentu.
2. Pembagian amplop berisi sejumlah uang pada calon pemilih menjelang hari H pemilihan. Juga dengan embel-embel berupa pesan untuk mencoblos daftar gambar tertentu. Modus seperti ini juga dapat

di lakukan di TPS-TPS yang terkontrol, misalnya di sekolahan atau instansi pemerintahan (Ismawan, 1999 : 48).

Penyebab adanya politik uang dalam pemilukades yaitu salah satu faktor karena masyarakat menganggap bahwa pemimpin yang di ajukan dalam suatu pesta demokrasi kurang berkenan di hati pemilih, penyebab yang kedua adalah karena pemilih mulai jenuh dengan proses demokrasi enam tahun sebelumnya yang tidak membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat, penyebab yang ketiga adalah pemilihan umum kepala desa tidak lagi di pandang masyarakat (Pemilih) sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat di perlukan dalam membangun kehidupan sehari-hari.

Partisipasi politik menurut Herbert Mc Closky (dalam Mariam Budiardjo, 2009 : 367) adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sementara itu, menurut Miriam Budiardjo (2009 : 367).

Sementara itu, menurut Miriam Budiardjo (2009 : 367) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti

memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan social dengan direcactionnya dan sebagainya. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi. Secara umum masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih di tentukan oleh golongan elit penguasa, keterlibatan warga Negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan bangsa relative sangat kecil.

Surbakti (1999) menyebutkan ada 2 variabel pentingnya yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang :

1. Aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak mendapatkan jaminan hokum.
2. Aspek menyangkut bagaimana penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan peemrintah. Dan juga luasnya partisipasi politik di pengaruhi oleh tingkat kemajuan bangsa, system politik yang di anut, masalah komunikasi.

Berikut ini akan dipaparkan beberapa penjelasan teoritis atau beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih, yaitu faktor social ekonomi, faktor sosiologis dan faktor kepercayaan politik, sebagai berikut:

1. Faktor Sosial Ekonomi Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku non-voting selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku non-voting tersebut. Namun, pada sisi lain, variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur karakteristik pemilih non-voting itu sendiri.

Setidaknya ada empat indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga (Efriza. 2012. Hlm 543). Lazimnya, variabel status socialekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku non-voting. Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan dengan kehadiran. Memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan pemutusan hubungan kerja. Tingkat pendidikan dapat dikatakan turut mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat di Kecamatan Juwana khususnya di desa Bajomulyo. Pengaruh Keluarga, Keluarga juga memberikan pengaruh yang cukup besar pada masyarakat Kecamatan Juwana dalam hal tidak ikut memilih pada Pemilu Kepala Desa, kuatnya pengaruh pimpinan keluarga (ayah) dalam menentukan pilihan politik keluarga. Secara umum apabila kepala

keluarga (ayah) tidak ikut memilih akan memberikan pengaruh kepada anggota keluarga lainnya untuk tidak ikut memilih.

2. Faktor Psikologis Penjelasan nonvoting dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Dalam konteks semacam ini, Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahir bahkan lebih bersifat keturunan dan muncul secara konsisten dalam setiap perilaku.
3. Faktor Pilihan Rasional Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu

yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variable-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. (Muhammad Asfar, 2004).

Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih. (Muhammad Asfar, 2004).

Penyelenggaraan pilukades yang terjadi tidak lepas dari umur politik uang. Politik uang merupakan cara untuk mempengaruhi pemilih dengan cara membagi-bagikan uang maupun barang kepada pemilih. Bagi sebagai masyarakat, momentum seperti pilukades di gunakan untuk mendapatkan keuntungan, baik atas nama masyarakat maupun atas nama golongan tertentu (kepentingan pribadi). Sedangkan bagi kandidat itu sendiri, momentum pilukades adalah momentum untuk membagi-bagikan uang (dalam bentuk yang bermacam-macam) untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Hal ini jelas menyimpang dari nilai-nilai demokrasi karena nilai bersuara telah

di kotori oleh kasus politik uang. Begitu juga kasus politik uang di sertai dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan sangatlah rendah, maka dari itu tidak sedikit dari masyarakat sangat mudah di pengaruhi oleh politik uang.

Berdasarkan penelitian yang terdahulu dari Taufiq Gunawan tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak masa jabatan periode 2009-2015 menjelaskan bahwa dalam pemilu kepala desa ini telah melanggar hukum yang berlaku di karenakan pada praktek demokrasi telah terjadi kecurangan seperti adanya money politic atau sering di sebut politik uang, dan seperti pemilu biasanya yang terjadi politik uang sudah membudaya di Indonesia. Dalam hal ini berarti partisipasi politik dan praktek demokrasi sendiri dapat di katakana kegiatan yang legal dan kegiatan yang ilegal yang biasanya berkaitan dengan kerugian yang dimunculkan akibat suatu tindakan partisipasi yang salah sebagai contoh dalam hal pemilihan kepala desa adalah pengerahan massa dari calon yang kalah dimana dikawatirkan akan berujung pada tindakan anarkis. Sedangkan faktor penghambatnya disebabkan oleh beberapa birokrasi yang kurang mendukung dalam program pemilihan kepala desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut pemberian suara dalam pemilu merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Dalam Negara demokrasi, voting menjadi ukuran paling minimum dari partisipasi. Hal ini menjadi pengaruh voting berlangsung dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam

konteks pemilu kepala desa ini, voting berpengaruh dalam jangka waktu enam tahun, pengaruh itu adalah karena efek dari voting melahirkan suatu formasi kekuasaan tertentu yang mengendalikan bekerjanya system politik. Voting dapat membatasi kekuatan-kekuatan politik mana yang dapat maupun yang tidak dapat di munculkan dalam suatu pemilu. Secara bersamaan, aksi voting ini juga memiliki intensitas konflik yang tinggi apabila tidak di kelola dengan baik, konflik yang akan muncul dari aktivitas voting yang dapat mengakibatkan konflik di antara pemilih ataupun calon kepala desa. Pertumbuhan darah bukan hal yang mustahil akan terjadi akibat dari voting ini. Peluang itu terutama akan muncul apabila dalam rangka voting proses politik tidak berlangsung secara free and fair. Terkait dengan partisipasi pemilu kepala desa ini, menyebabkan budaya politik pemilih dalam pemilu secara sederhana menjadikan budaya politik pemilih ini di maknai sebagai orientasi sikap pemilu terhadap pemilu dan bagian-bagiannya. Orientasi itu meliputi pengetahuan atau kepercayaan, perasaan atau afeksi, dan evaluasi atau penilaian terhadap pemilu secara umum, input dan output pemilu dan peran seseorang dalam pemilu. Di duga, variasi di dalam orientasi terhadap pemilu pada gilirannya akan sangat mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi secara keseluruhannya.

Berdasarkan latar belakang di atas hal tersebut juga terjadi di Desa Bajomulyo yang setiap ada penyelenggaraan pemilu kepala desa sering terjadi

politik uang untuk memberikan suara dan sudah umum terjadi. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Praktek Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Periode 2013-2017”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk di kaji dan di analisis, antara lain :

1. Adakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa ?
2. Adakah pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap tingkat partisipasi dalam pemilihan kepala desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat di uraikan sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek demokrasi pemilihan Kepala Desa di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati 2013

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan dalam hal :

- a. Kegunaan Teoritis

Berguna sebagai bahan pertimbangan dan pengetahuan baru bagi peneliti lain yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka mewujudkan pemilihan Kepala Desa secara jujur dan adil.

- c. Kegunaan Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama masyarakat Bajomulyo tentang peran masyarakat dalam berpartisipasi pemilihan kepala desa.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Pemilihan Kepala Desa

Berbeda dengan pilpres maupun pilkada, pemilukades telah berlangsung telah lama di selenggarakan secara langsung jauh sebelumnya, pemilihan desa secara langsung di nilai signifikan dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan dinamis. Demokrasi yan sehat dapat dipahami sebagai sebuah proses menuju masyarakat yang cerdas, mandiri dan bermartabat (Amrudin & Zaini Bisri).

Pemilihan kepala desa merupakan praktik demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepada desa untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa. Mengingat fungsi aparatur pemerintahan desa yang sangat menentukan maka calon kepala desa yang terpilih seharusnya bukan saja sekedar seorang yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan, akan tetapi di samping memenuhi syarat yang cukup dan dapat di terima dengan baik oleh masyarakat juga mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan sebagai Pembina masyarakat serta berjiwa panutan dan suri tauladan bagi warga desanya. Untuk itu harus benar-benar seorang pancasilis sejati yang

penuh dedikasi dan loyalitas yang cukup tinggi. Sebelum menjadi kepala desa, kepada desa di pilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia, oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk desa setempat, salah mencapai umur 17 tahun atau sudah pernah kawin, tidak di cabut hak pilihnya dan terdaftar dalam daftar pemilihan tetap (Mujiyanto).

Menurut Mohammad Nurhidayatulloh pemilukades (Pemilihan Kepala Desa) di Indonesia merupakan ajang pesta demokrasi paling merakyat, di mana semua warga desa akan terlibat langsung dalam pesta ini. Dampak psikologis akibat benturan emosional biasanya di rasakan langsung oleh warga dan menyisakan konflik horizontal pasca pemilukades. Sebagai bentuk demokrasi langsung pemilukades masih efektif sangat penting sebagai penentu kepanjangan tangan pemerintahan Indonesia.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti pemilukades (pemilihan kepala desa langsung) adalah salah satu bentuk pesta demokrasi yang paling nyata yang berhubungan langsung dengan akar rumput (rakyat) yang juga sering di warnai isu politik uang atau intrik politik. Hal ini di dorong oleh terbatasnya anggaran penyelenggara pemilukades. Keterbatasan anggaran ini membuat hanya para calon yang memiliki dana cukup yang mampu bersaing di dalam pemilukades tersebut.

Pemilihan kepala desa (pemilukades) merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting di kedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh fungsi aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar kontestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisme). Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencaonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, di harapkan akan terselenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa di katakana bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut di perhatikan secara cermat.

Lembaga penyelenggara pemilukades adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam menyelenggarakan pemilukades, BPD membentuk panitia pemilihan yang di isi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota BPD. Tetapi untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri dari unsur-unsur masyarakat (karang taruna,

kelompok perempuan, kelompok tani). Panitia pemilihan kepala desa memegang peranan yang strategis pada semua tahapan pemilihan. Mulai dari pendataan calon pemilih, penjangkaran bakal calon kepala desa, melaksanakan pemungutan suara, menghitung perolehan suara, dan melaporkan seluruh hasil pemilihan kepala desa. Karena itu personil yang di rekrut untuk menjadi panitia pemilihan harus orang-orang yang memiliki kecakapan dan ketrampilan dalam administrasi, logistic dan proses pemilihan.

1.5.2 Demokrasi Pemilu

Mekanisme pemilihan kepala desa di sebut demokrasi apabila memenuhi parameter. Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokrasi apabila :

1. Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur.

Rekrutmen jabatan politik atau public harus melalui pemilihan umum (pemilukades) yang di selenggarakan secara teratur dengan tenggang yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus di lewati karena dengan pemilu lembaga demokrasi dapat di bentuk. Kemudian setelah pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya. Penelitian terhadap kinerja pejabat publik akan di gunakan sebagai bakal untuk memberikan ganjaran atau

human (resource and punishment) dalam pemilihan mendatang. Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya dan tidak menjaga moralitasnya akan di hokum dengan cara tidak di pilih, sebaliknya pejabat yang berkenan di hati masyarakat akan di pilih kembali.

2. Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan

Rotasi kekuasaan merupakan parameter demokrasi tidaknya suatu rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandalkan kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa di pegang terus menerus oleh seseorang, seperti dalam system monarki. Artinya, kalau ada seseorang yang berkuasa terus menerus atau satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu-kewaktu system itu kurang layak di sebut demokratis dan cenderung mengarah pada pemerintahan yang otoriter. Dengan kata lain, demokrasi memberikan peluang rotasi kekuasaan atau rotasi pejabat politik secara teratur dan damai dari seorang Kepala Desa satu ke Kepala Desa yang lain, dari satu partai politik ke partai politik yang lain.

3. Mekanisme rekrutmen secara terbuka

Demokrasi terbuka membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama. Oleh karena itu dalam mengisi jabatan politik, seperti kepala desa sudah seharusnya semua peluang terbuka untuk semua orang

yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah di sepakati. Di Negara-negara totaliter dan otoriter, rekrutmen politik hanyalah merupakan dominan dari seseorang atau sekelompok orang kecil.

4. Akuntabilitas politik

Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang telah di lakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Seorang Kepala Desa atau pejabat politik harus dapat terbuka kepada publik yang telah memilihnya terutama mengenai kebijakan (Wibawanto, 2006 : 35-36)

Penyelenggaraan pemilukades yang berkualitas dapat tercapai manakala di tolong oleh prinsip-prinsip yang sesuai dan memadai. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya saja berfungsi sebagai pedoman akan tetapi menjadi bermakna sebagai pengarah penyelenggaranya. Selain itu pemilukades langsung dapat di sebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsip, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku dalam rekrutmen yang terbuka, yakni :

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya.

2. Umum

Pada dasarnya semua Negara yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak menggunakan hak pilih atau suara dalam suatu pemilihan umum (pemilukades). Pemilihan yang bersifat umum mempunyai makna yang menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa deskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis, kelamin, kedaerahan, dan status social.

3. Bebas

Setiap warga Negara yang bebas memilih tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara di jamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Pengertian ini ialah bahwa sebagai warga Negara yang telah memiliki hak untuk memilih mempunyai kewenangan yang mutlak dalam menentukan pilihannya. Mereka bisa leluasa memilih dan menentukan sendiri calon peserta pemilu yang di anggapnya paling aspiratif dan mendapat banyak keuntungan bagi dirinya, tidak ada alasan apapun yang membolehkan seseorang untuk menghalangi seorang warga Negara dalam menentukan pilihannya. Adanya

kebebasan untuk memilih ini merefleksikan terselenggaranya faham kedaulatan rakyat di suatu Negara.

4. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih di jamin dan pilihannya tidak akan di ketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat di ketahui oleh orang lain kepada siapapun suara di berikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan setiap pemilukades, aparat pemerintah, calon atau peserta pemilukades, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur. Makna yang terkandung di sini adalah bahwa penyelenggara maupun peserta pemilu tidak di perkenankan melakukan rekayasa ataupun manipulasi politik dengan tujuan memenangkan pihak-pihak tertentu. Tahapan-tahapan pemilu dari masa persiapan sampai pengucapan sumpah atau janji kepala desa terpilih di laksanakan apa adanya serta sejalan dengan aturan-aturan yang berlaku.

Pengertian yang terkandung di sini adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai dan menggunakan hak pilihnya sajalah yang mengetahui calon manakah yang mereka pilih sewaktu menjatuhkan pilihannya di

hari pemilu tersebut. Tidak seorangpun yang memiliki wewenang untuk mengetahui calon manakah yang menjadi pilihan orang lain, bagi mereka yang kurang terdidik (tidak mampu membaca dan menulis) realisasi prinsip ini kadangkala mengalami kendala.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih atau calon peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak manapun. Ketentuan ini mempunyai pengertian bahwa para penyelenggara tidak boleh membenarkan memihak ataupun bertindak berat sebelah terhadap calon peserta pemilu.

Dalam kajian akademik, demokrasi menurut Schumpeter (dalam Huntington 1991: 5) adalah sebuah metode yang memiliki prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat dalam pemilu.

1.5.3 Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Subakti (1992 : 140-141) partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya, sesuai dengan istilah partisipasi. Politik berarti keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Sementara menurut Michael Rush & Philip Althof (2001:147) menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum.

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat didefinisikan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam politik yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi proses kebijakan pemerintah, yang bisa diwujudkan melalui bentuk-bentuk partisipasi politik seperti mengikuti kampanye, pemungutan suara, lobby politik dan diskusi politik serta membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan. Untuk mengukur partisipasi politik, indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti diskusi politik
2. Mengikuti kampanye politik
3. Menggunakan hak suara di TPS

1.5.3.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson dalam Budi Suryadi (2007 : 129) yaitu kegiatan pemilihan mencakup suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan. Sementara itu menurut Rosenau dalam Arifin Anwar (2006 :35) bentuk partisipasi politik terdiri atas dua jenis. Pertama, para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya khalayak media yang secara aktif dalam diskusi, seminar dan memberikan komentar melalui media massa. Kedua, partisipasi aktif adalah khalayak yang bukan saja mengamati tetapi giat melakukan komunikasi dengan pemimpin politik atau politikus dipemerintahan.

Colin Mc Andrews (dalam Mas'oeed, 1989 : 47), mengatakan bentuk-bentuk partisipasi politik terdiri dari :

- a. Konvensional yaitu pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.
- b. Non Konvensional yaitu pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan,

pemboman, pembakaran), tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) perang gerilya dan revolusi.

Tabel 1.1
Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut pendapat Almond

Konvensional	Non Konvensional
Pemberian suara (Voting)	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi, mogok
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Tindak kekerasan politik harta benda (pengrusak, pengeboman)
Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative	Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)

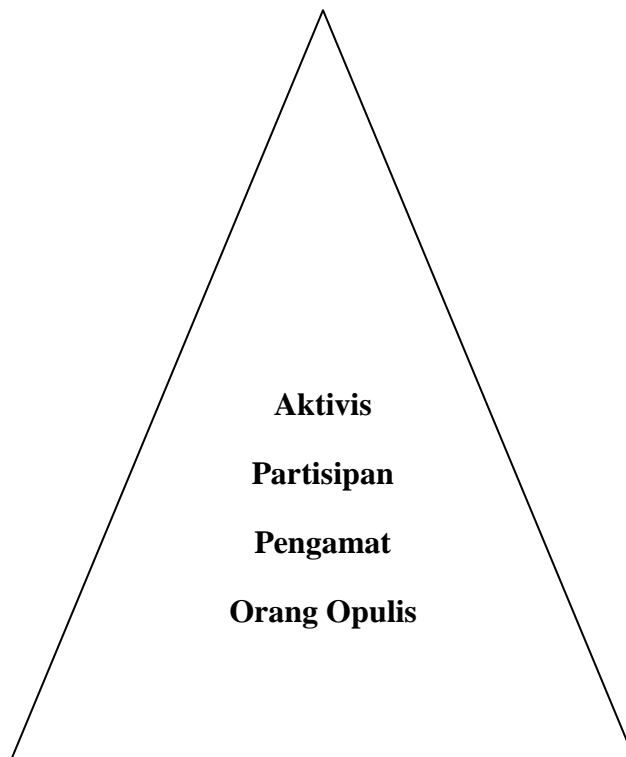
Sumber :Damsar (2010: 186)

Pemikiran Almond tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik yang bersifat umum, atau partisipasi politik tanpa kekerasan serta partisipasi politik yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam bentuk koersif atau jalur konflik.

Sementara itu, Roth dan Wilson dalam bukunya “*The Comparative Study Of Politics*” sebagaimana yang dikutip Budiardjo (1998) membuat

tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat keterlibatan aktifitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat didalamnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1
Piramida Partisipasi Politik



Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa identitas dan derajat keterlibatan yang tinggi dalam aktifitas politik dikenal sebagai aktifis. Adapun yang masuk dalam kelompok aktifis adalah pemimpin dan para fungsionaris partai atau kelompok kepentingan yang mengurus organisasi secara penuh waktu (FullTime). Termasuk didalamnya kategori ini adalah kegiatan politik

yang dipandang menyimpang atau negatif seperti membunuh politik, teroris, atau pelaku pembajakan untuk meraih tujuan politik.

Lapisan berikutnya setelah lapisan puncak piramida dikenal sebagai partisipasi. Kelompok ini mencakup berbagai aktifitas seperti petugas atau juru kampanye, mereka yang terlibat dalam program atau proyek sosial, sebagai pelobi politik, aktif dalam partai politik atau kelompok kepentingan.

Lapisan selanjutnya adalah kelompok pengamat, mereka ikut dalam kegiatan politik yang menyita waktu, tidak menuntut prakarsa sendiri, tidak intensif dan jarang melakukannya. Sedangkan lapisan terbawah adalah kelompok yang apolitis yaitu kelompok orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik. mereka tidak memberikan sedikitpun terhadap masalah politik. Partisipasi politik pada negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataannya dengan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu Negara ke negara lain, dengan kata lain tidak semua warga negara ikut dalam proses politik. Factor-faktor yang diperkirakan dengan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Menurut Mohtar Mas'ood, dalam Wahyu (2010:24) “indikator utama yang dimiliki oleh setiap pemilih pemula yang dianggap mendasari atau melatarbelakangi tingkat partisipasi pemilih pemula adalah tingkat

pendidikan, dan jenis kelamin”. Setiap anggota masyarakat memiliki latarbelakang tertentu yang beraneka ragam. Keragaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu, dan menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kehidupan politik. Selain pendidikan dan perbedaan jenis kelamin, status sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik. Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi daripada wanita, orang yang berstatus sosial; ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah.

Bentuk-bentuk dari frekuensi partisipasi politik diatas dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidak puasan warga negara. Agar penelitian ini lebih menurut Colin Mc Andrews yaitu pemberian suara, diskusi politik dan kampanye. Hubungan atau Pengaruh Kesadaran Politik dengan Partisipasi Politik Kesadaran dan partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dan saling berhubungan di dalam demokrasi. Kesadaran akan partisipasi politik rakyat apapun alasannya adalah merupakan suatu syarat utama yang harus dipenuhi dalam membangun negara bangsa yang demokratis. Ada berbagai bentuk partisipasi politik yang berkaitan dengan momen pemilu seperti saat ini, diantaranya ikut pada kegiatan diskusi politik, ikut serta dalam kampanye pemilu dan memberikan suara dalam pemilihan umum.

Menurut Surbakti (1992:144) kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan. Lebih jauh, Jeffry M. Paige dalam Surbakti (2007) menyebutkan ada variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yaitu kesadaran politik. Jadi, jika individu memiliki kesadaran politik maka ia akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara. Salah satu wujud dari kesadaran politik salah satunya bentuknya adalah partisipasi politik dalam kegiatan pemilu/pemilukada. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional.

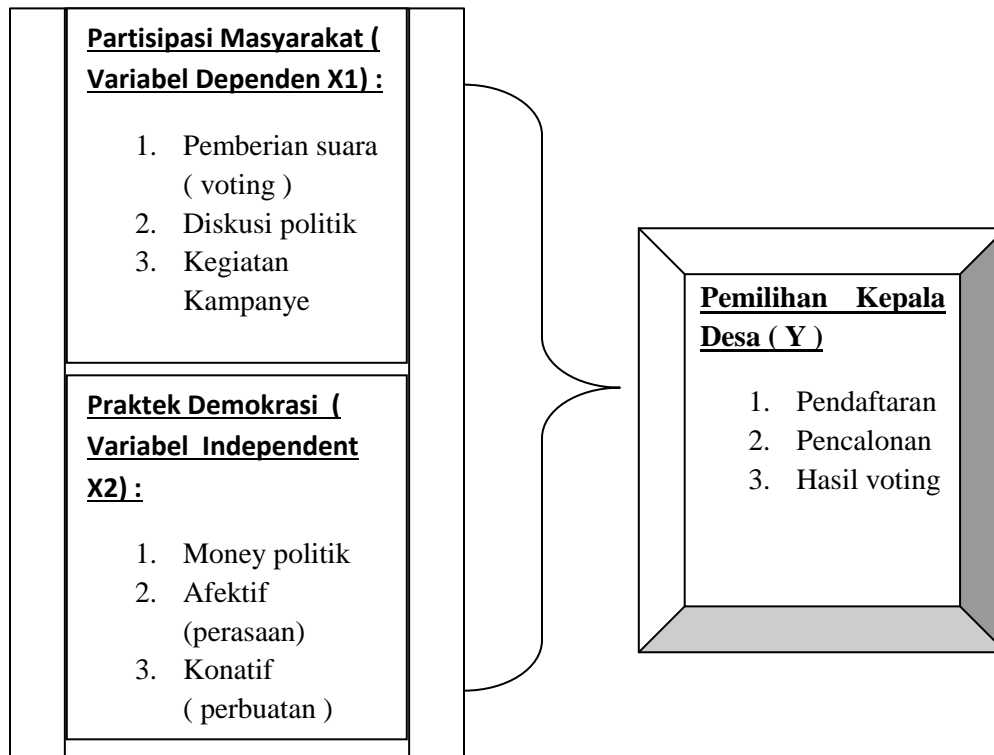
Partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi, seperti pada kasus pemilih yang hanya sekedar menggunakan pilihannya, namun sebenarnya ia hanya asal memilih. Sebaliknya, partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Dari penjelasan diatas maka dapat di katakan bahwa kesadaran politik berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat, karena apabila seseorang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara maka akan mendorong orang tersebut untuk berpartisipasi politik. Dari uraian di atas maka penulis berhipotesis sebagai

berikut : bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kesadaran Politik dengan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Masri Singarimbun dalam bukunya Mardalis (1999:45) kerangka konsep atau kerangka pikir adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama. Dalam penelitian ini hubungan praktek demokrasi dan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala desa.

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran



X1= Partisipasi masyarakat

X2= Praktek Demokrasi masyarakat

Y= Pemilihan Kepala Desa

H1=Menerangkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan pengaruh voting masyarakat terhadap pemilihan kepala desa

H2= Menerangkan bahwa praktek demokrasi masyarakat juga memberikan pengaruh voting masyarakat dalam memilih kepala desa

Demokrasi tidak menjamin di hasilkannya para pemimpin yang baik (dalam arti seluas-luasnya) dan hanya menjamin bahwa pemimpin yang populer (juga dalam arti seluas-luasnya) biasanya akan terpilih. Begitu dalam hal pemilihan para elite, begitu pula dalam hal pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Penyebabnya adalah metodenya yang menekankan voting itu tadi. Jadi, kalau banyak orang kecewa pada hasil-hasil demokrasi seperti itu, bukan berarti lantaran itu lalu demokrasi dapat di salahkan. Berdasarkan itu maka sepatutnyalah wacana demokrasi di biarkan bergulir di alektik terus-menerus sehingga produk-produk politik yang di hasilkannya lebih cocok dengan perkembangan zaman dan dapat memuaskan sebanyak-banyaknya warga di Negara yang bersangkutan. Jadi, demokrasi memang harus dinamis dan akomodatif. Dan karena itulah, apapun yang berkait dengan system dan prosesnya, baik para elite, konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan apa

saja, tidak sekali-kali boleh di sakralkan atau di anggap “sudah final” sehingga menutup peluang bagi terjadinya perubahan-perubahan yang lebih baik di masa depan. Di dasarkan pada ketidak mungkinan untuk mencapai finalitas itulah maka demokrasi berkait erat dengan rasionalitas. Karena demokrasi juga merupakan sebuah peradaban yang berorientasi pada kebaikan dan kebajikan, maka demokrasi pula berkait dengan moralitas.

Jadi, sesungguhnya demokrasi hanyalah “alat” untuk mencapai kebahagiaan yang ingin di wujudkan oleh manusia di dalam kehidupan. Dan yang utama adalah jika potensi setiap orang di beri peluang untuk berkembang seluas-luasnya melalui pengakuan dan kebebasan, kesetaraan dan keunikan individualitas. Dengan demikian, demokrasi juga bertujuan meningkatkan harkat-martabat manusia yang tak hirau latar belakang dari ras, etnik, agama, jenis kelamin, atau golongannya.

1.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan yang dikemukakan di dalam rumusan masalah yang akan diuji kebenarannya dan dipakai sebagai petunjuk dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam skripsi ini, hipotesis yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1.7.1 Uji t

Berdasarkan model penelitian ini, maka untuk melakukan pengujian hipotesis digunakan Uji t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Penelitian ini dilakukan dalam uji t parsial analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) berpengaruh signifikan pada variabel (Y)

1.8 Variabel Penelitian

1.8.1 Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi suatu keadaan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini praktek demokrasi merupakan variabel bebas. Praktek Demokrasi menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini. Penelitian tersebut membahas tentang pengaruh praktek demokrasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa, variabel ini menunjukkan bahwa penelitian ini memfokuskan bagaimana praktek demokrasi menjadi pengaruh dalam pemilu kades. Sehingga praktek demokrasi pemilu kades mampu menjadi sebab atas akibat – akibat dari variabel lainnya.

1.8.2 Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini pemilihan kepala desa merupakan akibat dari terbentuknya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Praktek demokrasi terhadap partisipasi masyarakat pemilih yang merupakan variabel bebas dan variable terikat mampu memberikan dampak – dampak positif maupun negatif bagi pemilihan kepala desa. Praktek demokrasi terhadap partisipasi masyarakat yang sebagaimana akan berpengaruh terhadap pemilihan kepala desa Bajomulyo di wilayah kecamatan Juwana.

1.9 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.9.1 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah mendefinisikan suatu konstruk dengan menggunakan konstruk – konstruk lain atau dengan kata lain, definisi konsep merupakan makna dari kata yang digunakan untuk menjelaskan variable dengan menggunakan persamaan katanya. Adapun definisi konsep variabel dalam penelitian – peneliti adalah :

1. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan siapa kepala desa yang baik yang mengayomi masyarakat.

2. Praktek Demokrasi adalah bagaimana nilai masyarakat yang menggunakan hak-nya secara netral atau dengan penekanan atas pembelian suara rakyat.
3. Pemilihan Desa di selenggarakan supaya Desa dapat tertata dengan adanya pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya.

1.9.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah konsep – konsep sosial yang sudah diterjemahkan menjadi satuan yang lebih operasional, yakni variabel dan konstruk, biasanya belum siap untuk diukur karena variabel dan konstruk sosial mempunyai beberapa dimensi yang dapat diukur secara berbeda. Definisi Operasional juga merupakan petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur variabel. Definisi Operasional dapat digunakan untuk membantu peneliti dalam menggunakan variabel yang sama. Berdasarkan definisi konsep tersebut diatas berikut dijasikan secara terintegrasi dalam seluruh variabel definisi konsep dan definisi operasional.

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini perlu dirumuskan definisi konseptual dan operasional setiap variabel yang diikutsertakan pada penelitian ini. Selain itu juga dijelaskan indikator-indikator yang mewakili pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Penelitian ini mencakup dua variabel yaitu Praktek Demokrasi sebagai variabel independent dengan 3

indikator dan 7 item pertanyaan serta Partisipasi Masyarakat sebagai variabel dependent dengan 4 indikator dan 9 item pertanyaan. Adapun defenisi konseptual dan operasioanlisasi variable penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2
Variabel Konsep dan Variabel Operasional pada Praktek Demokrasi (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) dalam Pemilihan Kepala Desa Bajomulyo

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala
Praktek Demokrasi (X1)	Suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga di artikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih	-Pemberian uang	Ordinal
		-Pemberian sembako	Ordinal
		-Keinginan pemilih	Ordinal
Partisipasi	Bagaimana seseorang yang	- Percaya terhadap	Ordinal

Masyarakat (X2)	ikut memilih dalam pemilu, yaitu dengan jalan memilih pimpinan dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi keputusan penyelenggaraan pemilu.	pemilu	Ordinal
		- Isu pemilu	Ordinal
		- Kedekatan kekerabatan	Ordinal

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan yang dominan di dalam penelitian ini dan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan pendukung yang melengkapi hasil dari penelitian ini.

Pendekatan kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Tujuan utama dari metodologi ini ialah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang di perkirakan akan berlaku pada suatu sampel tertentu. Generalisasi dapat dihasilkan melalui suatu metode

perkiraan atau metode estimasi yang umum berlaku didalam statistika induktif. Dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur praktek demokrasi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Bajomulyo dengan cara survey sehingga dapat menghasilkan data yang obyektif terhadap fenomena social yang terjadi di Kecamatan Juwana utamanya di desa Bajomulyo.

Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menggali informasi dan mendapatkan data melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian apakah praktek demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa mampu memberikan pengaruh positif pada pemilihan suara di lokasi penelitian dan apakah masyarakat memiliki kesadaran politik. Selain dengan pengamatan langsung, juga dilakukan analisis dari hasil kuesioner.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam penelitian “Praktek Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati” Penulis akan meneliti tentang fenomena-fenomena keterlibatan masyarakat dan pengaruhnya

dalam pemilihan kepala desa Bajomulyo, sehingga metode deskriptif dianggap sesuai dengan penelitian ini.

1.10.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Penelitian ini difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Bajomulyo terhadap praktek demokrasi pada pemilihan kepala desa.

Desa Bajomulyo dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah di Desa Bajomulyo merupakan salah satu pusat masalah di mana kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa terutama di Kecamatan Juwana, sehingga menjadi sebab dari penyelewengan praktek demokrasi atas pemilu kepala desa di Desa Bajomulyo sendiri yang berakibat pada penyalahgunaan hak suara pada partisipasi pada pemilihan kepala desa.

Gambar 1.3



1.11 Populasi dan Sampel

1.11.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda – benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati . Peneliti akan lebih memfokuskan lagi dari populasi penduduk desa Bajomulyo akan di jadikan sampel penelitian yang akan di ambil dari beberapa warga untuk di jadikan responden untuk mengisi kuesioner yaitu dari beberapa Rt dan Rw yang ada di Desa Bajomulyo.

1.11.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sebagai sampel. Dan Desa Bajomulyo dipilih karena rata-rata dalam pemilihan kepala desa memang masyarakatnya

banyak yang tidak tahu informasi mengenai pemilihan umum. Jumlah penduduk di Desa Bajomulyo adalah 5.804 jiwa dan terdiri atas 1.538 KK. Desa Bajomulyo memiliki satu Dusun yaitu Dusun Karangmangu yang sampelnya akan diambil dari beberapa responden yang berada di Rt 1 sampai 4 dan Rw 1 sampai 2 secara acak, dan pengambilan responden di luar Dusun Karangmangu akan diambil secara acak lagi dari jumlah 11 Rt dan jumlah 4 Rw dengan penyebaran kuesioner secara acak. Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus dari Frank Lynch.

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p(1-p)}{N \cdot d^2 + Z^2 \cdot p(1-p)}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Populasi

Z : Tingkat Kepercayaan (95%)=1,96

P : Besar kemungkinan (0,50)

d : Sampling error (10%=0,10)

$$n = \frac{5804 \times 3,8416 \times 0,25}{57,69 + 0,9604}$$

$$n = \frac{5574,1616}{58,6504}$$

$$n = 95 \text{ orang}$$

1.11.3 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan Cluster Random Sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber sangat luas. Inilah hasil distribusi sampel menurut Desa yang diambil sebagai sampel secara acak di Desa Bajomulyo adalah : 95 orang yang akan diambil dari Dusun Karangmangu 40 orang dan dari keseluruhan desa Bajomulyo di ambil sampel responden 55 orang yang rata dari Rt 5 sampai 11 dan Rw 3 sampai 4 secara acak.

1.12 Jenis Data

1.12.1 Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan datang pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

1.12.2 Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

1.13 Metode Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:265) instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Serta merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner juga cocok digunakan jika jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pengaruh praktek demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati .

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik. Karena observasi ini di gunakan dalam penyebaran kuesioner dan pengamatan langsung informasi yang terjadi dengan

obyek pilih. Sutrisno Hadi, dalam Sugiyono (2012:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses psikologis. Diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

1.13.1 Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan praktek demokrasi dan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

1.13.1.1 Analisis Data Kuantitatif

Secara umum, analisis data untuk dapat menjawab permasalahan penelitian menggunakan analisis regresi, namun demikian untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang baik maka perlu memenuhi asumsi distribusi data yang normal, tidak terjadinya tumpang tindih data, data yang sudah andal, dan data yang layak untuk di analisis lebih lanjut. Untuk itu perlu dilakukan uji kelayakan data melalui uji validitas dan reliabilitas.

1. Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan kata lain, validitas ingin mengukur apakah

pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur dalam penelitian ini. Mengukur validitas instrument penelitian dapat dilakukan dengan cara :

1. Jika nilai r hitung $>$ r tabel maka item pertanyaan bersifat valid
2. Jika nilai r hitung $<$ r tabel maka item pertanyaan bersifat tidak valid dan pertanyaan tersebut harus dikeluarkan dari analisis.

2 Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat yang mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk penelitian. Bagi tujuan reliabilitas instrumen penelitian, pengujian cronbach alfa akan dilakukan. Pelaksanaan pengujian ini akan menentukan kesesuaian instrumen di dalam mendapatkan data-data jawaban terhadap masalah dalam penelitian. Pengujian ini juga membolehkan tingkat keabsahan item-item dalam kuesioner yang dapat digunakan di dalam penelitian ini. Pengukuran alfa Cronbach adalah yang terbaik di dalam mengukur reliabilitas yang menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran.

3 Analisis Tabel Tunggal

Tabel Data Tunggal adalah tabel yang menyatakan data dalam bentuk bilangan, biasanya disajikan kedalam bentuk frekuensi tunggal.

4 Analisis Tabel Silang

Analisis tabel silang atau crosstab adalah suatu keadaan, tujuan mengumpulkan data frekuensi untuk menentukan hubungan antara dua pengelompokan data yang berbeda. Data yang seperti ini di kelompokkan dalam tabel adalah dua dimensi yang di sebut tabel silang (crosstab) atau tabel contingensi (contingency tabel) dua dimensi.